

RINGKASAN

Penelitian ini berjudul “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyumas dalam Menegakkan Perda Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Studi Penertiban Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar di Kota Purwokerto)”. Dalam penelitian ini kinerja Satpol PP Kabupaten Banyumas dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain yaitu: *input*, *process*, *output*, dan *outcome*. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pemilihan informan dilakukan melalui *purposive sampling* dan *insidental sampling*. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis interaktif. Untuk menjamin keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek *input* Satpol PP Kabupaten Banyumas yang dilihat dari sumber daya manusia yang ada di Satpol PP masih belum ideal. Anggaran yang tersedia seluruhnya bersumber dari APBD dan masih sangat kurang. Sarana dan prasarana yang tersedia cukup lengkap dan masih layak digunakan namun idealnya masih perlu adanya penambahan kendaraan. Satpol PP memanfaatkan teknologi informasi dengan menyebarkan nomor Unit Inovasi Pelayanan Publik dan memanfaatkan media sosial serta aplikasi *WhatsApp* untuk memantau dan melaporkan situasi di lapangan. Sumber kewenangan Satpol PP dalam menertibkan PGOT yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015. Aspek *process* dalam penertiban PGOT dilakukan melalui kegiatan patroli dua sampai tiga kali dalam sehari dan operasi penertiban pekat. Koordinasi dalam penertiban PGOT dilakukan secara internal antara Kasi Kerjasama dengan Kasi Opsdal dan Bidang P2D dan secara eksternal dengan Kader Siaga trantib, Dinsosnakertrans dan Balai Rehabilitasi. Upaya penertiban PGOT menggunakan pendekatan persuasif dan rehabilitatif dan tetap menjunjung azas kemanusiaan. Kendala yang dihadapi dalam proses penertiban yaitu kurangnya anggaran, jadwal yang padat, PGOT sering kali melarikan diri dan terbatasnya kapasitas penampungan PGOT. Aspek *output* menunjukkan bahwa lingkungan Kota Purwokerto terutama di persimpangan jalan relatif lebih aman namun masih ada PGOT di tempat-tempat umum dan permukiman. Kesadaran dari para PGOT yang telah dibina dan direhabilitasi juga sangat rendah. Sedangkan dari aspek *outcome* masyarakat Kota Purwokerto belum sepenuhnya merasa aman dan tentram dari gangguan PGOT dan masih banyak PGOT yang kembali lagi turun ke jalan setelah ditertibkan dan direhabilitasi.

Penelitian ini memberikan implikasi yaitu peningkatan baik dari jumlah personil, sarana dan prasarana serta anggaran dan nomor Unit Inovasi Pelayanan Publik juga perlu diaktifkan kembali. Dalam upaya penertiban PGOT Satpol PP harus meningkatkan koordinasi eksternal baik dengan KST maupun dengan instansi terkait yaitu Dinsosnakertrans untuk memastikan bahwa PGOT yang telah ditertibkan tidak kembali berkeliaran.

Kata kunci: Kinerja Satpol PP, *input*, *process*, *output*, dan *outcome*.

SUMMARY

The title of this research is "Performance of Pamong Praja Police Unit (Satpol PP) Banyumas regency in Enforcing Regulation No. 16 of 2015 About the Disease Control Society (Study Curbing Beggars, Homeless and Displaced People in Purwokerto)". In this research, performance of Satpol PP Banyumas Regency can be seen from several aspects, among others, namely: input, process, output and outcome. The method used is descriptive qualitative research method. The informant technique choosing was done by purposive sampling and incidental sampling. Meanwhile, collecting data technique was done by depth interviews, observation and documentation. Methods of data analysis using interactive analysis. To ensure the validity of the data, researcher used the triangulation source.

This research showed that the input aspects of Satpol PP Banyumas seen from the human resources that exist in the Satpol PP is still not ideal. Budget provided entirely sourced from the APBD and is still lacking. Facilities and infrastructure was complete and still good to use, but ideally they need the addition of a vehicle. Satpol PP use of information technology to disseminate Public Service Innovation Unit numbers and utilize social media as well as application WhatsApp to monitor and report on the situation on the ground. Sources of Satpol PP authority in curbing PGOT regulated in Law No. 23 of 2014 and Regulation Banyumas No. 16 of 2015. Process aspect in the curbing PGOT done through patrol activities two to three times a day and PEKAT operation. Coordination in curbing PGOT done internally between kasi Opsdal with kasi Cooperation and P2D field and externally with Kader Siaga Trantib, Dinsosnakertrans and Rehabilitation Center. Curbing PGOT use persuasive approach and rehabilitative and always upholding the principles of humanity. Obstacles encountered in the process of curbing are the lack of budget, the hectic schedule, PGOT often escape and limited storage capacity for the PGOT. Aspects output shows that Purwokerto especially at the crossroads relatively safe but PGOT still exist in public places and settlements. Awareness of the PGOT who had nurtured and rehabilitated is also very low. Mainwhile the outcome aspect, purwokerto society has not fully feel safe and secure from tampering PGOT and many PGOT which again took to the streets after disciplined and rehabilitated.

The implications of this research is to increase number of personnel, infrastructure, and budgets and Public Service Innovation Unit numbers also need to be reactivated. In an effort to curb PGOT Satpol PP should improve external coordination both with KST or with relevant agencies, namely Dinsosnakertrans to ensure that PGOT which have curbed not return roam.

Keywords: Satpol PP performance, input, process, output and outcome.